



Pemkot Bakal Rombak OPD Sesuai UUK

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal melakukan penyesuaian terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan amanat UU Keistimewaan (UUK) DIY.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, mengatakan, dalam aturan tersebut beberapa dinas akan digabung, dipisah maupun berdiri sendiri. Nama kecamatan juga akan diubah menjadi kemantren sesuai dengan amanat dari Undang Undang Keistimewaan DIY.

"Lewat Perda baru ini akan ada beberapa OPD yang akan mengalami perubahan," kata Patricia kepada wartawan, Rabu (4/11).

Beberapa dinas yang akan digabung yakni Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial digabung menjadi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pengendalian Penduduk

bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipisah menjadi Dinas Perdagangan serta Dinas Perindustrian digabung dengan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.

Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kebakaran menjadi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Badan kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta ada penambahan badan baru yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan berganti menjadi Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana sesuai Undang-Undang Keistimewaan. Untuk Dinas Kebudayaan berubah nama menjadi Kundha Kabudayaan. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005